

# ASEAN 2015: MENCAPAI AMBISI REGIONALISME ASIA TENGGARA

Oleh: Khanisa Krisman

## Review Buku

Judul : *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015* (Kumpulan Tulisan)  
Pengarang : C.P.F. Luhulima  
Editor : Awani Irewati  
Penerbit : Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI  
Tahun Terbit : 2010  
Halaman : xxvii + 425 halaman

## Abstract

*This review consists of views on ASEAN development related to the three pillars of ASEAN Community and the problem in those three background issues, politic and security, economy and socio-culture. Looking forward The ASEAN Community in 2015, the review tries to understand the author's prediction about the massive goal of making ASEAN as the center of the regional, and also to provide a comprehensive observation on the dynamics and recent development of ASEAN.*

**Keywords:** ASEAN, regionalism, South East Asia.

## Abstrak

Ulasan buku ini mencakup pandangan perkembangan ASEAN terkait dengan tiga pilar komunitas ASEAN dan permasalahan yang melatarbelakanginya; politik dan keamanan, ekonomi, dan sosial budaya. Untuk menyambut Komunitas ASEAN 2015, ulasan buku ini berupaya memahami prediksi pengarang buku ini tentang tujuan besar pendirian ASEAN sebagai pusat kawasan dan untuk memberikan pengamatan yang menyeluruh atas dinamika dan perkembangan terkini ASEAN.

**Kata kunci:** ASEAN, regionalisme, Asia Tenggara

## Pengantar

Kawasan Asia Tenggara telah diketahui oleh para kolonialis dari Eropa sejak lama berkaitan dengan kepentingan politik dan ekonomi maupun penyebaran agama. Kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara seperti Majapahit di Indonesia, Angkor di Kamboja, Ayudhya di Thailand, dan Pagan di Myanmar<sup>1</sup> telah lebih dahulu mempunyai visi persatuan kawasan di bawah kekuasaan mereka. Namun, dalam perkembangan sejarah modern, pembentukan organisasi regional pertama di

Asia Tenggara adalah South East Asia Treaty Organization (SEATO) pada 1954.

SEATO merupakan sebuah pakta pertahanan yang dibentuk Amerika Serikat untuk membendung pengaruh komunisme.<sup>2</sup> Amerika Serikat yang saat itu sedang dalam persaingan ideologi dengan Uni Soviet berupaya membentuk tembok pertahanan untuk menghalangi persebaran paham komunisme. Teori Domino yang dikeluarkan oleh Presiden Dwight Eisenhower menyatakan pentingnya menjaga wilayah dunia yang masih dianggap “bersih” sebelum komunisme menjalar

<sup>1</sup> Donald. E. Weatherbee, *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Authonomy*, (Singapura: ISEAS, 2010), hlm. 7.

<sup>2</sup> Arfin Sudirman *et al.*, *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 231.

lebih jauh, khusus di wilayah Asia Tenggara. Amerika Serikat sedang menghalau jalur penyebaran komunisme dari Vietnam.<sup>3</sup>

Perkembangan regionalisme di kawasan ini lalu berlanjut pada 1961 dengan terbentuknya Association of Southeast Asia (ASA) yang beranggotakan Malaysia, Filipina, dan Thailand. Ketiga negara ini juga tergabung dalam Maphilindo (Malaysia, Filipina, Indonesia) yang terbentuk pada 1963. Namun sama dengan ASA, Maphilindo pun tidak berumur panjang.

Pada akhirnya ASEAN dapat dibentuk pada 1967 dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina di Bangkok. Melalui Deklarasi Bangkok, kelima menteri luar negeri setuju atas sebuah pembentukan organisasi regional yang akan memayungi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Organisasi ini kemudian diperkaya dengan lima anggota tambahan, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja<sup>4</sup>. Tambahan anggota ini tentu saja memberi warna baru bagi ASEAN, bukan hanya dalam jumlah, namun juga keanekaragaman potensi yang dapat dikembangkan, maupun masalah yang dimiliki tiap-tiap negara.

Perjalanan ASEAN sejak 1967 merupakan sebuah proses diplomasi panjang, di mana setiap anggotanya berupaya menemukan formula yang tepat mengenai apa yang sebenarnya ingin diraih ASEAN. Sebuah visi dan misi yang cukup sulit untuk dirumuskan mengingat ASEAN terdiri dari 10 negara yang memiliki latar belakang yang sangat beragam, bukan hanya secara budaya namun juga tata cara pemerintahan.

“Dinamika Asia Tenggara menuju 2015” merupakan sebuah bacaan yang sangat komprehensif untuk memahami usaha ASEAN dalam mengembangkan visi dan misi yang sesuai bagi region tersebut. Kumpulan karya C.P.F. Luhulima ini memberikan ulasan dari berbagai sisi mengenai pembentukan identitas ASEAN yang dicanangkan akan terwujud pada tahun 2015. Mungkinkah hal itu terwujud? Bagaimana buku ini mengungkap dari berbagai permasalahan ekonomi, politik dan keamanan yang dihadapi

negara-negara ASEAN? Hal-hal tersebut akan dipaparkan dalam review buku ini.

## Dokumen Formal ASEAN

Setelah berdiri selama 40 tahun, dalam ASEAN Summit ke-13 pada 2007 di Singapura, ASEAN akhirnya memiliki sebuah dokumen legal yang berisikan ketentuan-ketentuan konstitusi ASEAN. Sebuah ASEAN Charter/Piagam ASEAN yang berisikan 55 pasal yang mengatur seluruh hal berkenaan dengan ASEAN, mulai dari komitmen politik, pembagian kerja, pertemuan, badan-badan ASEAN, keanggotaan, penyelesaian masalah, hingga hal-hal simbolis ASEAN, seperti bendera, emblem, motto, mars, dan hari peringatan ASEAN.<sup>5</sup> ASEAN Charter ini juga memasukkan sebuah persetujuan yang telah dirancang dalam *Bali Concord II* yang berisikan pembangunan tiga komunitas ASEAN, yaitu

- Komunitas Keamanan ASEAN (ASEAN Political-Security Community);
- Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community); dan
- Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASEAN Socio-Cultural Community).

Ketiga komunitas yang disetujui perwujudannya pada 2020 kemudian dimajukan menjadi tahun 2015 pada pertemuan di Cebu, Filipina. Selanjutnya, ketiga pilar itu menjadi dasar dan arah pembangunan regional ASEAN. Ketiga pilar itu tidak dapat dilepaskan atau saling berpautan sebagai sebuah kesatuan mengenai aspek-aspek yang pasti terdapat di dalam pembicaraan politik internasional secara umum serta dalam pembentukan ASEAN pada khususnya.

Pembangunan tiga bidang ini membutuhkan komitmen yang tinggi karena sedari awal pembentukan ASEAN didasarkan pada prinsip *non-interference* demi menjaga dan mempertahankan kedaulatan negara pada isu-isu nasional. Walaupun pada masa kini isu-isu nasional bisa jadi berkaitan dengan kepentingan negara lain dalam region, misalnya krisis ekonomi yang disebabkan instabilitas keamanan suatu negara. Masalah keamanan dalam negeri mungkin tidak

<sup>3</sup> Donald E. Weatherbee, *op.cit.*, hlm. 64–65

<sup>4</sup> Arfin Sudirman *et al.*, *op.cit.*, hlm. 232

<sup>5</sup> Versi lengkap Piagam ASEAN, dalam <http://www.aseansec.org/publications/ASEAN-Charter.pdf>, bisa diunduh melalui situs ASEAN Sekretariat di halaman ASEAN Charter, <http://www.aseansec.org/21861.htm>.

akan menular ke negara tetangga, karena hal tersebut merupakan konflik yang terjadi secara lokal. Namun, krisis ekonominya sedikit banyak berdampak pada keberlangsungan pembangunan regional ASEAN. Hal ini disebabkan oleh adanya keterikatan perekonomian dalam region.

Sayangnya, walaupun rencana-rencana yang telah digariskan dalam cetak biru begitu penting, Piagam ASEAN masih memiliki kelemahan hukum dengan ketiadaannya ikatan seperti hukuman yang akan memaksa negara yang sudah menandatangani untuk mematuhi isi dari piagam tersebut.

## Perekonomian ASEAN

Perekonomian merupakan jejaring yang pasti dimiliki tiap negara dalam sebuah kawasan, jadi penting untuk membahas perekonomian dalam pembangunan sebuah kawasan. Bagian pertama yang menjadi pembuka buku ini membahas hal tersebut. Mekanisme kerja sama ekonomi ASEAN, perdagangan bebas, dan perkembangan Masyarakat Ekonomi ASEAN menjadi garis besar yang mewarnai bagian ini. Perekonomian negara-negara ASEAN sendiri, seperti juga keragaman budayanya, memiliki statistik yang berbeda di tiap negara. Singapura dengan nilai GDP per kapita sebesar US\$38.048, disusul Brunei Darussalam dengan GDP sebesar 35.623. Untuk delapan negara lainnya terentang di kisaran US\$ 7.992 di Malaysia sampai US\$465 di Myanmar.<sup>6</sup> Angka ini bukan berita yang cukup baik bagi para perumus kebijakan perekonomian regional. Dengan rentang perbedaan tingkat kemakmuran yang sangat signifikan antarnegara ASEAN maka dibutuhkan sistem yang dapat memberikan keuntungan bagi negara-negara berpendapatan besar, namun tetap menjaga negara-negara kecil untuk dapat terus berkompetisi di dalam perekonomian regional.

Kerangka kerja sama ASEAN mencoba menjawab hal tersebut. Kerja sama *ASEAN Plus Three* (APT) dicanangkan untuk meningkatkan perdagangan, investasi dan transfer teknologi; kerja sama teknologi informasi dan *e-commerce*;

serta meningkatkan usaha kecil dan menengah.<sup>7</sup> Dengan mitra kerja sama, seperti Jepang, Cina, dan Korea langkah ini tidak dimaksudkan sebagai penyerahan diri pada raksasa perekonomian di Asia Timur, tetapi lebih kepada aksi menggandeng negara-negara tersebut untuk memberikan keuntungan dan kemajuan perekonomian bagi ASEAN. Apabila ikatan itu tidak dilakukan ASEAN sendiri akan sulit melawan hegemoni ekonomi barat dengan usaha sendiri.

Penguatan di dalam ASEAN untuk menghadapi kerja sama juga mutlak diperlukan. Pembahasan mengenai kerja sama ASEAN di bidang pembagunan sosial menjawab hal ini. ASEAN Socio-Cultural Community merupakan bagian dari strategi ASEAN dalam mempersiapkan individu-individu yang berkualitas. Peningkatan taraf hidup, pemenuhan kebutuhan akan hak asasi manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan kesetaraan merupakan arteleri penting yang harus dilengkapi sebelum berjuang dalam perang eksistensi di taraf internasional. Pembentukan badan HAM, seperti ASEAN Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR) dan pencanangan ASEAN University Network (AUN) merupakan langkah awal yang harus ditindaklanjuti.

Dengan adanya persiapan-persiapan tersebut, kemudian terdapat pertanyaan besar yang muncul, seberapa jauh ASEAN dapat mempersiapkan dirinya untuk sebuah region Perdagangan Bebas atau *Free Trade Area* (FTA)? Saat ini beberapa pihak masih melihat konsep tersebut sebagai sebuah ancaman, bahkan dikutip dari buku ini negara besar seperti Jepang sendiri masih sulit untuk merelakan pembebasan setiap barang dan jasa untuk masuk ke dalam negaranya. Masih terdapat lini-lini yang mereka lindungi dalam ranah domestik seperti pertanian, perikanan, dan kehutanan.<sup>8</sup> Lalu bagaimana dengan negara-negara ASEAN? Sama halnya dengan negara-negara besar, negara-negara di ASEAN, termasuk Indonesia masih meragukan kesiapan mereka dalam menghadapi AFTA. Akan lebih mudah membuat perjanjian perdangan bebas bilateral karena semakin banyak pihak yang ikut

<sup>6</sup> Data dari Asean Economic Community Chartbook 2009, dalam <http://www.aseansec.org/publications/AEC-Chartbook-2009.pdf>, diunduh pada 7 Februari 2011.

<sup>7</sup> Lihat Awani Irewati (Ed.), *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*, (Jakarta: P2P LIPI, 2010), hlm. 2

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

serta tentunya akan semakin banyak instrumen pengaturan yang harus dibentuk.

*Free trade* dan pelbagai permasalahan ekonomi di region merupakan lapangan tugas ASEAN Economic Community (AEC). Badan ini mempunyai misi besar untuk membawa integrasi ekonomi yang cocok untuk ASEAN juga memajukan kerja sama *East Asia Summit* di kawasan Asia Pasifik. Misi itu telah diusahakan dalam serangkaian kerangka usaha liberalisasi investasi, perdagangan, dan jasa serta fasilitasi perdagangan dan bisnis seperti yang dipaparkan dalam buku ini. Adapun tantangan dari dalam ASEAN yang dihadapi AEC merupakan hal yang ironis karena negara-negara ASEAN sepertinya masih memiliki keengganan untuk menjalin hubungan ekonomi dengan tetangganya dan lebih senang menjalin hubungan ekonomi dengan pihak di luar ASEAN.<sup>9</sup>

### Perpolitikan ASEAN

Menyambung pembahasan perekonomian dengan pembahasan mengenai politik merupakan hal yang tepat, mengingat hubungan yang sangat erat di antara kedua masalah tersebut. Namun, bagian ini juga tidak sepenuhnya berkaitan dengan kebijakan-kebijakan politik ekonomi. Pembahasan politik berarti mengembalikan ulasan topik-topik pembuatan kebijakan dari kerangka ASEAN hingga masalah-masalah spesifik yang berkaitan dengan perpolitikan itu sendiri, secara khusus bagian ini mengangkat isu ekonomi, keamanan, dan sudut pandang nasional Indonesia.

Mengulas kembali poin-poin pilar ASEAN yang diwakili tiga masyarakat ASEAN, ekonomi, keamanan, dan sosial budaya merupakan hal yang penting pada tiap pembahasan bidang mana pun dalam ASEAN, terutama bidang politik yang dapat dikatakan sebuah payung yang menaungi konsep pembelajaran tentang ASEAN. Sejalan dengan pendapat penulis yang mengatakan tiga pilar dan masyarakatnya adalah jawaban ASEAN terhadap tantangan-tantangan baru yang muncul.

<sup>9</sup> Sampai tahun 2008, ASEAN Trade Performance intra-ASEAN hanya 26,8% dibandingkan extra-ASEAN yang mencapai 73,2%. Data dari Asean Economic Community Chartbook 2009, dalam <http://www.aseansec.org/publications/AEC-Chartbook-2009.pdf>, diunduh pada 7 Februari 2011.

Pemahaman tentang pilar-pilar dan kelompok masyarakat tersebut memang harus diakui merupakan sebuah kunci untuk memaknai bentuk region seperti apa yang diinginkan ASEAN di 2015.

Masyarakat ASEAN adalah dasar pembentukan ASEAN. Masyarakat diharapkan bukan hanya menjadi objek kebijakan namun juga subjek yang membentuk masyarakat itu sendiri. Mengenal masyarakat ASEAN dengan kata lain adalah mengenal modal-modal yang dimiliki ASEAN dalam pembangunan ke depan.

Adapun hal menarik pada pembahasan lebih lanjut di bagian politik adalah penjabaran mengenai problematika ekonomi politik di Asia Pasifik di tahun 1930-an yang diambil dari sudut pandang Dr. Ratu Langie, penulis buku *Indonesia in den Pasific, Kernproblemen van Aziatischen Pasific* (1937).<sup>10</sup> Pembelajaran dari sisi sejarah penting untuk mengingatkan kembali kekuatan yang telah dimiliki region ini, khususnya ASEAN, sebagai kesadaran pentingnya pembangunan kawasan yang sedang dilakukan.

Saat itu Dr. Ratu Langie telah mengidentifikasi adanya perpindahan perimbangan kekuatan dunia dari Eropa sebagai pemegang hegemoni tunggal ke Amerika Serikat dan Jepang yang kian garang memasuki dunia perpolitikan global khususnya dalam usaha mereka menguasai Asia Pasifik. Di region itu sendiri, Dr. Ratu Langie memetakan adanya empat kompleks kekuatan: Selatan yang dikuasai tiga negara Eropa (Belanda, Inggris, dan Prancis), dengan kota-kota Cina sebagai pusatnya; Timur yang dikuasai Amerika Serikat yang meliputi wilayah seluruh wilayah Amerika, Barat di bawah kekuasaan Jepang yang mencakup Jepang, Cina, Thailand, dan Filipina; serta Utara yang dikuasai dan mencakup kawasan Uni Soviet.

Pembagian kekuasaan ini mengingatkan kita pada betapa berharganya kawasan Asia Pasifik bagi dunia global. Kawasan Asia Pasifik yang kaya akan sumber daya menjadi sebuah tambang emas yang terlalu menggoda untuk dilewatkan. Terlebih lagi setelah Perang Dunia I yang memporak-porandakan Eropa, kelahiran kekuatan-kekuatan seperti Amerika, Jepang, dan

<sup>10</sup> Lihat Awani Irewati (Ed.), *op.cit.*, hlm.103.

Uni Soviet membuat kompetisi untuk menguasai Asia Pasifik semakin besar. Apabila penguasaan Asia Pasifik begitu penting, tampaknya hal ini menggeser wilayah inti dunia yang digambarkan Halford Mackinder dalam teori Heartland yang diungkapkannya pada tahun 1904. Asia Pasifik telah menjadi target ambisi baru bahkan sampai saat ini. Dengan asumsi tersebut maka tidak mengherankan apabila dalam perkembangannya sampai saat ini Asia Pasifik, pada khususnya negara-negara Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN terus berusaha mengembangkan kerangka yang kuat agar memiliki otoritas yang dibutuhkan dalam menjadi aktor global, dan bukan hanya target politik dan pasar global.

Namun, untuk menjadi region yang berhasil menjadi aktor dalam ranah global, ASEAN perlu melakukan pembenahan internal dan eksternal terlebih dahulu. Jalinan keluar dan penguatan ke dalam adalah syarat mutlak apabila ASEAN ingin menjadi sebuah region yang dipandang masyarakat global.

Pada jalinan keluar ASEAN sudah memiliki *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) untuk mendasari kerja samanya dengan mitra-mitra diluar kawasan. Secara spesifik terdapat pula ASEAN+3, +6 dan berbagai hubungan lainnya antarkawasan maupun dengan negara tunggal. Salah satu hubungan penting itu adalah dengan Cina. Seperti dijabarkan dalam buku ini pada penjalinan hubungan dengan Cina, ASEAN harus tetap menjaga hubungan-hubungan baik dengan negara lain seperti India, Jepang, dan Amerika Serikat. Hal ini dapat dimengerti karena hubungan yang terlalu erat dengan satu pihak akan menciptakan suasana yang kurang baik. Selain menghindari dominasi pihak tersebut, juga akan sulit menjalin hubungan-hubungan dengan pihak lain.

Berlanjut ke pembahasan pembenahan internal, kawasan ASEAN tidak dapat dikatakan sebagai kawasan yang stabil tanpa banyak konflik di dalamnya. Sebaliknya, banyaknya perbedaan di antara negara-negara membuat konflik sering kali muncul ke permukaan. Konflik yang banyak terjadi adalah seputar perbatasan. Konflik perbatasan wajar terjadi dalam region yang terdiri dari banyak negara, terlebih lagi saat negara-negara tersebut merupakan bekas koloni dari negara

kolonial yang berbeda. Perbedaan pemetaan dan batas-batas wilayah menjadi masalah yang menurun ketika negara jajahan tersebut akhirnya merdeka. Bukan hanya Asia, masalah yang sama juga terjadi di Afrika, yang kemudian terjadi konflik penentuan perbatasan yang legal ketika negara yang mengkoloni angkat kaki dari negara itu.

Garis perbatasan biasanya menjadi masalah ketika terdapat sumber daya alam. Hal inilah yang terjadi di Sipadan dan Ligitan. Pembahasan kasus Sipadan dan Ligitan dalam buku ini memiliki bahasan yang komperhensif sekaligus detail. Terdapatnya pembahasan kasus Ambalat memberikan saran yang baik dalam penanganan kasus perbatasan agar hal yang sama tidak terulang.

Kasus perbatasan laut merupakan salah satu konflik yang sulit diselesaikan secara tuntas. Walaupun sudah ada keputusan bersama, namun pengawasannya membutuhkan upaya yang lebih sulit dari pengawasan perbatasan darat. Konflik perbatasan laut akan lebih kompleks apabila terdapat lebih dari satu negara yang terkait di dalamnya. Kasus Laut Cina Selatan yang dibahas dalam buku ini merupakan contoh yang baik dalam memahami konflik laut antara beberapa negara.

Pada kasus Laut Cina Selatan sendiri, walaupun tidak bersengketa secara langsung, kasus pelik ini tetap berkaitan dengan Indonesia karena wilayah tersebut bersinggungan dengan Gugusan Natuna. Penyelesaian yang diajukan penulis melalui konsep yang dikembangkan oleh Loise Diamond dan John McDonald, yaitu *multitrack diplomacy*, merupakan gagasan yang menarik. Penyelesaian dengan hubungan antarnegara saja kadang tidak memberikan solusi yang fleksibel karena formalitas dan kekakuan birokratis negara-negara tersebut. *Multitrack diplomacy* akan memungkinkan dilibatkannya banyak pihak untuk mencari jalan keluar yang lebih komperhensif.

Penguatan internal ASEAN yang bersinggungan dengan tiap-tiap negara di dalamnya memberikan pengertian yang berbeda tentang ASEAN pada tiap-tiap negara. Bagi Indonesia, ASEAN tentunya merupakan salah satu badan luar negeri terpenting. Selain merupakan bagian

di dalamnya, Indonesia juga menjadi salah satu pionir dalam pembentukan ASEAN serta banyak menjadi pengarah kebijakan ASEAN. ASEAN juga telah menjadi sebuah titik perhatian penting bagi para Presiden Indonesia, seperti juga tertulis di buku ini mengenai makna penting ASEAN bagi Soeharto. Peran Soeharto yang cukup signifikan dalam pembentukan dan perkembangan ASEAN juga disetujui Donald E. Weatherbee dalam bukunya *International Relation in South-east Asia: The Struggle for Autonomy* (2010). Menurut Weatherbee, dalam masa pemerintahan Soeharto, Indonesia memegang peranan penting bukan hanya sebagai tempat beradanya markas besar ASEAN, namun juga “sumber tidak resmi atas keberlanjutan kebijakan ASEAN”.<sup>11</sup>

### Keamanan ASEAN

Seiring dengan berkembangnya permasalahan internasional, isu keamanan di dalam region ASEAN pun semakin berkembang. Bukan hanya isu perbatasan antarnegara, tetapi juga isu-isu kejahatan dengan jaringan transnasional. Terorisme, penyelundupan manusia, obat-obatan, senjata, pembajakan, dan berbagai kasus lainnya membuat ASEAN harus memformulasikan kembali tentang konsep keamanan macam apa yang harus dikembangkan. Bagaimana mencegah, menangani serta memperbaiki sistem keamanan yang ada.

Sebagai sebuah kawasan yang diapit daratan dan lautan, ASEAN terdiri dari kawasan kepulauan dan daratan. Ancaman keamanan dapat datang dari berbagai arah. Belum lagi era kemajuan teknologi memungkinkan adanya ancaman dari dunia maya. ASEAN harus mengembangkan sebuah sistem keamanan terpadu yang didukung oleh semua negara. *Free-riding* merupakan hal yang tidak mungkin dilakukan pada isu ini. Pada kasus kejahatan transnasional, seperti penyelundupan obat-obatan terlarang misalnya, setiap negara harus memberlakukan sistem bea cukai yang ketat karena apabila tidak kesepuluh negara ASEAN akan terancam sebuah masalah yang sama, tumbuhnya jaringan perdagangan obat-obatan yang akan merusak citra region.

Kebersatuan ASEAN pada isu keamanan sendiri telah dimulai di tahun 1970 dengan adanya Deklarasi ZOPFAN (*Zone of Peace, Freedom and Neutrality*). Deklarasi ini menunjukkan kebulatan sikap ASEAN dalam menolak adanya perang dan penggunaan senjata nuklir di kawasan ini. Sebagai negara-negara muda yang baru membangun pasca-Perang Dunia kedua, stabilitas kawasan adalah hal yang menjadi prioritas. Dengan demikian, ASEAN terus memperjuangkan perdamaian di region dengan mengikat diri pada asas penghormatan kedaulatan yang juga dituangkan pada *Treaty of Amity and Cooperation* (TAC) pada tahun 1976. Evolusi itu kemudian berlanjut pada perwujudan ASEAN *Regional Forum* (ARF) di tahun 1994 yang kemudian disempurnakan pada tahun 2003 dengan pembentukan Masyarakat Keamanan ASEAN atau ASEAN *Political-Security Community* (ASC).

Dalam *ASEAN Political Security Community Blueprint*, ASC memiliki 3 visi tentang rancangan keamanan ASEAN di tahun 2015:

- *A rules based Community of shared values and norms,*
- *A cohesive, peaceful and Resilient Region with Shared Responsibility for Comprehensive Security*
- *A Dynamic and Outward-Looking Region in An Increasingly Integrated and Interdependent World”*.<sup>12</sup>

Dari ketiga bentuk yang diinginkan ini maka dapat disimpulkan bahwa ASC *Blueprint* berfokus pada 3 hal penegakan hukum, pencapaian stabilitas, dan penggalangan hubungan luar region untuk mewujudkan visi tersebut.

Segala instrumen yang disiapkan ASEAN dalam menangani isu politik dan keamanannya diharapkan dapat memecahkan permasalahan baru yang terus muncul. *ASEAN Regional Forum* terus dikerahkan secara efektif untuk mencari jalan keluar yang bersifat damai untuk meminimalisasi adanya kerusakan maupun kerugian yang dialami pihak-pihak yang bersangkutan. Cara-cara seperti diplomasi preventif yang dijabarkan di buku ini menawarkan jalan

<sup>11</sup> Donald E. Weatherbee, *op.cit.*, hlm. 93.

<sup>12</sup> Versi lengkap dari *ASEAN Political Security Community Blueprint*, dalam <http://www.asean.org/5187-18.pdf>, bisa diunduh melalui situs ASEAN Sekretariat di halaman ASEAN Political Security Community, dalam <http://www.asean.org/18741.htm>.

alternatif dalam pencegahan konflik. Diplomasi preventif seperti yang tersurat dalam istilahnya merupakan strategi mencegah perluasan suatu konflik. Dikenalkan oleh PBB, cara diplomasi preventif diterjemahkan ASEAN dalam ARF sebagai cara penyelesaian konflik antarnegara, namun tidak untuk diberlakukan pada konflik-konflik dalam negeri negara anggota.<sup>13</sup>

Dalam hal penjagaan keamanan ASEAN memang memiliki dilema besar dengan adanya konsep *non-interference* dan penjunjangan tinggi pada kedaulatan yang telah disetujui dari awal. Tentunya hal tersebut mencegah ASEAN bersuara dalam isu-isu yang dikategorikan sebagai isu nasional oleh negara asal. Sebagai contoh, permasalahan penegakan demokrasi di Myanmar yang menjadi batu sandungan yang terus menyulitkan ASEAN dalam pencitraan diri sebagai region demokratis.

Sepertinya akan sulit untuk ASEAN dalam menysar pemenuhan *human security* karena banyak aspek di dalamnya berkenaan dengan isu-isu sensitif di dalam negeri. Adapun yang dapat dilakukan ASEAN adalah menemukan pendekatan baru yang dapat melunakan asas *non-interference* agar di masa mendatang konflik-konflik nasional tidak menyebar menjadi konflik regional karena tidak dapat ditangani lebih dini.

Instrumen ASEAN dalam menangani konflik tidak hanya dengan penanaman nilai-nilai diplomasi, namun ASEAN sebagai kawasan yang kaya akan sumber daya juga melakukan hal-hal nyata seperti usaha penjagaan bersama yang dilakukan dengan koordinasi antarnegara anggotanya. Singapura, Malaysia, dan Indonesia salah satu kelompok yang membentuk koordinasi itu. Seperti terjabarkan dalam bagian ini, ketiga negara ini melakukan koordinasi dalam penjagaan Selat Malaka yang menjadi salah satu jalur perdagangan penting yang menghubungkan belahan bumi barat dan timur. Penjagaan bersama melalui pemantauan udara dan laut juga melibatkan pihak pemakai jalur ini, yang merupakan kapal-kapal pengangkut dari perusahaan asing.

Penting untuk menyadari bahwa jalur ini bukan hanya jalur yang berjasa dalam bidang

perekonomian, namun juga penjagaan jalur ini merupakan usaha penjagaan stabilitas politik dan keamanan di kawasan karena Selat Malaka memiliki peran sejarah panjang dalam masuknya pengaruh asing ke dalam region. Selama pemantauan dan penyaringan berjalan baik maka Selat Malaka dapat menjadi pemersatu negara-negara ASEAN khususnya penghuni wilayah perairan. Penanganan bersama pada Selat Malaka seperti juga telah dibahas diberlakukan pula pada kawasan Laut Cina Selatan. Bagi ASEAN, kestabilan kawasan merupakan hal yang harus dipenuhi untuk menjamin mulusnya jalan ASEAN menuju 2015 dan masa-masa setelahnya.

### **Saran bagi Pembangunan Regional ASEAN**

Membaca keseluruhan buku ini akan memberi gambaran tentang sebuah proses penuh tantangan. Semangat bahwa ASEAN dapat menjadi region yang maju dapat dirasakan, namun saran dan kritik yang diungkapkan buku ini terhadap ASEAN merupakan sebuah hal yang nyata dan harus dipertimbangkan demi kemajuan kawasan.

ASEAN harus meluas. Kata meluas di sini bukan berarti ASEAN harus menambah keanggotaannya, tetapi memperluas jalinannya dengan wilayah di luarnya. ASEAN tidak boleh berpuas diri dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat yang selama ini menjadi mitra kerja sama. Terdapat kekuatan-kekuatan seperti Rusia dan India yang kini mulai menjajaki ASEAN sebagai mitra kerja sama potensial mereka. Kesempatan ini tidak boleh dilewatkan dan dibuang sia-sia.

ASEAN harus mempertegas diri. Kiprah ASEAN harus diakui masih belum terasa di antara negara-negara di region tersebut. Kelemahan Sekretariat ASEAN yang dinilai sebagai pengatur administrasi tidak mempunyai kekuatan tekan yang cukup dalam membuat negara-negara anggota menghormati dan mengikuti keputusan ASEAN. Dalam buku ini disarankan perubahan “sekretariat” menjadi “komisioner” demi menaikkan otoritas markas besar ASEAN di mata anggota-anggotanya. Penting untuk mengingat bahwa ASEAN menghormati kedaulatan setiap anggota tetapi kelemahan ASEAN dalam mengatur anggotanya memperlihatkan ASEAN

<sup>13</sup> Lihat Awani Irewati (Ed.), *op.cit.*, hlm. 294.

belum menerima *feedback* penghormatan dari para anggotanya tersebut. Kekuatan baru ASEAN diharapkan dapat membawa ketegasan yang akan memudahkan anggota-anggota di dalamnya bersinergi dengan piagam yang telah ditandatangani.

ASEAN harus mempertegas identitasnya. Keberagaman “penghuni” ASEAN membuat region ini kesulitan menyatakan dirinya sebagai satu kesatuan. Pembangunan arsitektur regional masih bergerak di ranah ide dan belum banyak dirasakan pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat umum di ASEAN. “*We*”-ness yang sedang digalang seperti belum menemukan konsep pasti tentang apa yang harus dirasakan seseorang sebagai anggota dari komunitas bernama ASEAN.

Dari segala saran dalam buku ini hal yang menarik adalah bagaimana penulis menawarkan cara-cara alternatif seperti *multitrack diplomacy* yang membuat ASEAN tidak melulu dipegang hanya oleh orang-orang di tingkat elite semata.

### **Permasalahan Sosial dan Budaya dalam ASEAN**

Buku ini memiliki pembahasan yang cukup lengkap tentang sejarah perkembangan ASEAN di sektor ekonomi, politik, dan keamanan, namun diperlukan tambahan literatur lain untuk membahas bidang sosial budaya dalam ASEAN. Walaupun ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) telah dimasukkan dalam salah satu bab di buku ini, tetapi pembahasan ASCC tidak diulas secara mendalam.

Keanekaragaman sosio kultural ASEAN tentunya memiliki banyak topik yang dapat digali. Mengingat keanekaragaman sosio-kultural adalah hal yang paling *salient* dari ASEAN yang memiliki 10 negara dengan karakter etnis masyarakat yang berbeda-beda. Indonesia, Malaysia, dan Singapura sendiri sudah menjadi *melting pot* bertemunya berbagai ragam bangsa yang membentuk komunitas-komunitas etnis masing-masing. Negara-negara Indocina seperti Vietman, Laos, Kamboja, dan Myanmar juga menambah kayanya etnisitas, bahasa, dan budaya dari region ini.

Selain pembelajaran tentang enisitas, budaya, dan bahasa, ASCC juga mencakup isu pembangunan, perekonomian, juga lingkungan. Adapun cetak biru ASCC poin-poin kesejahteraan itu terdiri atas:

- *Human Development,*
- *Social Welfare and protection,*
- *Social Justice and Rights,*
- *Ensuring Environmental Sustainability,*
- *Building ASEAN identity,* dan
- *Narrowing the Development Gap.*<sup>14</sup>

Luasnya cakupan ASCC berkenaan dengan dasar pembangunan sosial dan kultural dalam komunitas ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tentang pembahasan etnisitas, budaya, dan bahasa, hal itu berkaitan dengan kata kultural. Sementara untuk kata sosial sendiri memiliki spektrum yang tidak kalah luas.

*Sosial* di sini berkenaan dengan hubungan masyarakat dan hal-hal yang menunjangnya. Itulah yang menyebabkan dalam ASCC juga memasukkan *development, welfare, rights and justice* dan *environment*. *Development* dan *welfare* merupakan bagian dari perekonomian dan *rights and justice* bagian dari keamanan. Namun mengapa hal-hal ini berada dalam akun ASCC? Penyebabnya adalah keterhubungan hal-hal itu dengan kemasyarakatan secara langsung, masyarakat menikmati perekonomian dan memiliki kebutuhan akan keamanan seperti juga sebuah negara. Akan tetapi, tentunya lingkup *development, welfare* serta *rights and justice* di sini lebih mengarah pada masyarakat umum sebagai penggunaannya. Pengaturannya pun lebih terimplementasi pada kebijakan yang berkenaan dengan keseharian masyarakat, seperti pendidikan dan ekonomi mikro. Sementara untuk kebijakan lingkungan tentunya hal ini langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat karena lingkungan itu sendiri merupakan “tempat tinggal” dari masyarakat.

<sup>14</sup> Versi lengkap dari ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint, dalam <http://www.aseansec.org/5187-19.pdf>, bisa diunduh melalui situs ASEAN Secretariat di halaman ASEAN Socio-Cultural Community dalam <http://www.aseansec.org/18770.htm>.



## Penutup

Mencermati keberadaan ASEAN berarti menemukan keberagaman etnis dan suku bangsa, sejarah perjuangan panjang menuju negara yang berdaulat, perkumpulan negara-negara membentuk kawasan baru, berbagai konflik perbatasan, sampai pembentukan kawasan pasar bebas yang menjunjung tinggi kebebasan dan kesetaraan.

Akan tetapi, hal itu tidak dapat didalami dengan hanya menyelami satu sisi dari ASEAN. Terdapat tiga pilar yang ditawarkan ASEAN, ekonomi, politik keamanan, dan sosial budaya. Ketiganya berkaitan satu sama lain dengan kasus-kasus yang menarik di tiap pembahasan.

Ketiga pilar ini juga mengindikasikan adanya tiga ruang lingkup yang luas yang menjadi acuan pembangunan ASEAN di masa mendatang. Setiap pilar memiliki sejarah berbeda yang memperkaya ranah pembahasan masing-masing pilar. Sebagai contoh pembahasan perihal politik dan keamanan dalam kasus Laut Cina Selatan, apabila hanya dipelajari dari satu dekade saja maka akan sulit mengetahui bagaimana asal sebuah isu itu dapat terjadi dan apa yang akan terjadi pada wilayah itu di masa mendatang.

Buku ini menawarkan pemahaman atas dasar-dasar penting yang harus dikuasai dalam mempelajari ASEAN lebih jauh dan mencari tahu jalur-jalur yang dapat menyatukan region ini dalam sebuah payung besar ASEAN. Kesepuluh anggota tidak dapat begitu saja disatukan dengan kerangka administratif yang kaku, penyesuaian dan perubahan kerap kali dibutuhkan agar ASEAN dapat berpadu dengan baik di setiap negara.

Kekurangan pada pembasahan tentang sosial budaya dapat diatasi dengan lebih jauh mencari literatur yang banyak membahas hal tersebut. Namun, apabila sudah mengetahui dasar pembentukan serta pengetahuan mengenai pilar-pilar dan masyarakat ASEAN, rasanya akan lebih mudah mengerti mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dan berkembang dalam ASEAN.

## Daftar Pustaka

- ASEAN Economic Community Chartbook 2009, dalam <http://www.aseansec.org/publications/AEC-Chartbook-2009.pdf>, diunduh pada 7 Februari 2011.
- ASEAN Political Security Community Blueprint, dalam <http://www.asean.org/5187-18.pdf>, diunduh melalui situs ASEAN Sekretariat di halaman ASEAN Political Security Community, dalam <http://www.asean.org/18741.htm>.
- ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint, dalam <http://www.aseansec.org/5187-19.pdf>, diunduh melalui situs ASEAN Sekretariat di halaman ASEAN Socio-Cultural Community dalam <http://www.aseansec.org/18770.htm>.
- Irewati, Awani (Ed.). 2010. *Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015*. Jakarta: P2P LIPI.
- Piagam ASEAN, dalam <http://www.aseansec.org/publications/ASEAN-Charter.pdf>, diunduh melalui situs ASEAN Sekretariat di halaman ASEAN Charter, <http://www.aseansec.org/21861.htm>.
- Sudirman, Arfin *et al.* 2010. *Regionalisme dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Weatherbee, Donald E. 2010. *International Relations in Southeast Asia: The Struggle for Authonomy*. Singapura: ISEAS.